

Mencermati Salah Paham Terhadap KBK: “Kasus AIK~UMY”

Sudah beberapa saat Kurikulum Berbasis Kompetensi didiskusikan di UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). Namun, pemahaman sivitas akademika UMY, termasuk para dosen dan birokratnya, tampaknya belum memadai.

Jika melihat publikasi UMY atau pejabatnya, kekurangpahaman tidak sepenuhnya merupakan “dosa” para birokrat universitas ini. Dalam banyak hal, pemahaman yang keliru terjadi – justeru – di beberapa unit terkait. Hal itu tampak, antara lain, dalam formulasi rencana pelaksanaan proses belajar-mengajar AIK” yang sama sekali tidak ada perbedaan substansial dengan kurikulum sebelumnya. Lebih parah lagi, pemaknaan KBK sama sekali tidak dikaitkan dengan pembentukan life skills, konsep yang amat sentral dalam KBK.

Sudah amat tepat ketika orang mencirikan paradigma baru kurikulum AIK-PTM (termasuk di dalamnya AIK untuk UMY) yang berbasis kompetensi berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang-meski di”gonta-ganti”, berbasis subject matter (matakuliah yang diajarkan di semua prodi di lingkungan UMY). Dengan kata lain, pada kurikulum yang lampau tujuan instruksional sebuah matakuliah tidak disusun lebih dulu menurut perumusan kompetensi mahasiswa yang diharapkan tercipta dari pembelajaran sebuah matakuliah, tetapi sekadar demi menanamkan materi yang disepakati terkandung dalam sebuah matakuliah.

Misalnya, matakuliah AIK-UMY. Dalam kurikulum lama, prosedur penyusunan dimulai lebih kurang dengan mendaftar secara lengkap semua komponen materi matakuliah AIK, sebagaimana dipahami para ahli (authorities) di bidang ini, lalu dialokasikan atau dibagi (habis) ke masing-masing semester dengan sks yang beragam. Ada yang diajarkan di semester I, II, III dan IV dengan bobot 8 sks secara berurutan, dan ada pula yang diacak pada semester-semester yang tidak berurutan.

Akibat prosedur seperti ini, kemungkinan besar penyusunan kurikulum terlepas dari perspektif-penting mengenai tujuan sebuah materi kuliah diberikan kepada mahasiswa, baik dalam masa-masa pendidikannya maupun kelak setelah memasuki kehidupan sebagai orang dewasa. Yang penting seluruh materi pelajaran selesai ditanamkan (baca: dijejalkan) kepada peserta didik di jenjang pendidikan tinggi. Akibatnya, kadang sebuah materi yang terlalu complicated, banyak di antaranya seharusnya menjadi konsumsi mahasiswa FAI (Fakultas Agama Islam) di universitas, harus diajarkan di luar FAI.

Maka, bukan hanya terlalu sulit, bahan-bahan itu mungkin sama sekali tak perlu diajarkan untuk jurusan-jurusan yang dimaksud karena tak akan memberi kontribusi apa-apa bagi pencapaian tujuan pendidikan. Tak bisa tidak hal ini berpeluang besar menghasilkan kemubaziran yang diakibatkan kurikulum yang terlalu padat. Baik kemubaziran waktu mahasiswa dan dosen, maupun potensi yang seharusnya bisa digunakan untuk kegunaan yang lebih relevan.

Dalam KBK, prosedur ini dibalik. Penyusunan silabus dan kisi-kisi dimulai dengan penyusunan lebih dulu kompetensi yang hendak dibangun lewat pemberian sebuah materi perkuliahan. Dalam hubungan ini, sebagai ganti istilah tujuan instruksional (khusus), dipakailah istilah yang lebih gamblang, yakni kompetensi.

Sebagai pelengkap, ditambah konsep-konsep untuk memperkuat pengertian kompetensi yang dipakai, yakni komponen hasil belajar dan indikator hasil belajar. Baru setelah itu dipilih materi-materi perkuliahan yang dipercaya mendukung pengembangan kompetensi yang telah disepakati. Maka, bisa jadi seluruh materi sebuah matakuliah – misalnya AIK – akan terbagi habis ke seluruh semester dengan distribusi sks yang proporsional, tetapi bisa jadi tidak. Dengan kata lain, materi sebuah perkuliahan bisa diputuskan untuk tidak diajarkan di semester tertentu. jika tidak relevan dengan pengembangan kompetensi yang diharapkan.

Di sinilah masuk konsep yang tak kalah penting, life skills (keterampilan-keterampilan hidup). Sudah hampir merupakan suatu salah kaprah di kalangan masyarakat, termasuk dunia pendidikan, mengartikan istilah ini sebagai keterampilan vokasional yang perlu untuk dunia kerja. Padahal, istilah ini memiliki pengertian lebih luas. Keterampilan vokasional hanya satu bagian kecil konsep dari life skills ini. Lebih dari itu, ia mencakup keterampilan personal, keterampilan sosial, dan keterampilan akademik.

Mengikuti definisi kecerdasan majemuk (multiple intelligencies) Howard Gardner, termasuk dalam keterampilan-keterampilan itu adalah kecerdasan eksistensial atau spiritual (SQ), kecerdasan intra dan interpersonal (EQ), bahkan kecerdasan naturalistik (berinteraksi dengan lingkungan).

Tak heran jika dalam salah satu publikasi Diknas disebutkan, sebagai contoh, keterampilan membina rumah tangga yang bahagia merupakan sejenis kompetensi yang perlu-sebenarnya amat perlu-dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum berdasar KBK.

Mungkin tak ada salahnya jika mengajak pembaca mengasosiasikan pengertian life skills dengan tujuan pendidikan menurut UNESCO. Yakni: cakap berpikir (learning how to think), cakap berbuat atau bertindak (learning to do), kecakapan (intrapersonal) untuk hidup (learning to be), kecakapan untuk belajar (learning how to learn), dan kecakapan (interpersonal) untuk hidup bersama (learning to live together).

Ringkasnya, KBK yang dipahami benar bertujuan menyiapkan peserta didik untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup (well being), yang seharusnya menjadi tujuan puncak segenap proses pendidikan.

Dengan pemahaman seperti itu, KBK yang diterapkan dengan benar diharapkan akan terus memelihara perspektif, baik di kalangan pewenang penyusunan kurikulum, insan pendidikan, para dosen, dan pengembang bahan-bahan ajar, mengenai tujuan ataupun jengkal demi jengkal proses kegiatan belajar mengajar yang tepat (appropriate).

Khusus terkait pengembangan bahan-bahan ajar, terutama buku pegangan, adalah amat krusial untuk memastikan semuanya dikembangkan dengan pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip KBK. Jangan sampai paradigma benar ini dirusak dalam penerapannya oleh bahan-bahan ajar yang bukan saja tidak sejalan, tetapi justru menyesatkan.

Apalagi, di antara prinsip-prinsip lain KBK adalah adanya desentralisasi penyusunan kurikulum sesuai kompetensi lokal yang dibutuhkan. Lebih dari itu, perguruan tinggi diberi keleluasaan mengembangkan silabus matakuliah sendiri. Maka, inisiatif lokal dan sekolah-yang digunakan dengan benar-menjadi amat penting di sini, baik untuk memastikan adanya kesesuaian antara kompetensi yang hendak dikembangkan dan kebutuhan lokal, maupun dalam melahirkan kemampuan selektif dan korektif atas bahan-bahan ajar yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip KBK.

Apa yang disampaikan dalam uraian itu sebenarnya baru sebagian dari prinsip-prinsip KBK. Namun, mengingat sentralnya konsep-konsep itu, pemahamannya menjadi amat menentukan bagi penerimaan dan pemahaman KBK secara keseluruhan, serta ketepatan dan keberhasilan penerapannya dalam dunia pendidikan kita, termasuk di dalamnya “UMY” kita.

Yogyakarta, 27 November 2012